

Strategi Inovatif Dalam Implementasi Pemberantasan Korupsi Pada Kasus Korupsi Stasiun Railink Di Bandara Kualanamu

Rayhan Arif Dwiputra¹, Yoserizal²

¹ Universitas Andalas, rayhanarifdwiputra@gmail.com

² Universitas Andalas, yose.unand@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Okt, 2024

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Korupsi, Stasiun Railink, Strategi Inovatif

Keywords:

Curruption, Railink Station, Innovative Strategies

ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi inovatif dalam pemberantasan korupsi, khususnya pada kasus korupsi Stasiun Railink di Bandara Kualanamu. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab korupsi, merumuskan strategi inovatif, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Stasiun Railink didorong oleh kurangnya transparansi, birokrasi yang rumit, rendahnya supervisi, dan budaya korupsi. Strategi inovatif yang disarankan meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta implementasi sistem *reward* dan *punishment*. Selain itu, kolaborasi multi-instansi juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di masa depan dengan menerapkan strategi yang lebih terarah dan efektif.

ABSTRACT

This article discusses innovative strategies in combating corruption, specifically regarding the corruption case of the Railink Station at Kualanamu Airport. This research aims to identify the causes of corruption, formulate innovative strategies, and outline the steps that need to be taken before implementing these strategies. The research findings indicate that corruption at the Railink Station is driven by a lack of transparency, complicated bureaucracy, low supervision, and a culture of corruption. The suggested innovative strategies include the utilization of information technology and digitization, public education and awareness, strengthening internal and external oversight, as well as implementing a reward and punishment system. Additionally, multi-agency collaboration is also necessary to enhance transparency and accountability in public budget management. This research hopes to contribute to future anti-corruption efforts by implementing more targeted and effective strategies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Rayhan Arif Dwiputra

Institution: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: rayhanarifdwiputra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia, seperti yang terjadi pada proyek Railink di Bandara Kualanamu, menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus memiliki strategi inovatif yang tidak hanya efektif saja, tetapi juga efisien dan berkelanjutan, yang di mana strategi tersebut bisa digunakan untuk kedepannya. Dalam artikel ini, saya akan membahas beberapa strategi inovatif yang dapat di implementasikan untuk menangani kasus seperti ini dan mencegah terulangnya hal yang serupa di masa yang mendatang.

Railink adalah sebuah perusahaan yang dibentuk untuk menyediakan layanan kereta pada Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara. Proyek yang mereka lakukan ini direncanakan untuk mendukung mobilitas penumpang dari dan ke Bandara Kualanamu, tetapi muncul laporan terkait penyalahgunaan wewenang proyek ini dan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan layanan kereta ini. Kasus ini menarik perhatian dari publik dan menciptakan kebutuhan mendesak untuk solusi yang inovatif dalam penanganan dan pencegahan korupsi, terutama di sektor publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Korupsi dalam Sektor Transportasi Publik*

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam sektor transportasi publik. Menurut Transparency International (2024), sektor ini rentan terhadap praktik korupsi karena besarnya anggaran yang dikelola dan kompleksitas dalam pengadaan proyek. Korupsi dalam transportasi publik sering terjadi pada tahap perencanaan, pengadaan, dan operasional, yang mengakibatkan inefisiensi penggunaan anggaran serta penurunan kualitas layanan publik (Gultom et al., 2024).

Kasus korupsi Railink di Bandara Kualanamu menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat berdampak buruk terhadap sektor ini. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi dalam proyek transportasi publik antara lain kurangnya transparansi dalam pengadaan, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi (Akbar, 2024).

2.2 *Strategi Pemberantasan Korupsi*

Pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang inovatif agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yang terdiri dari pencegahan, penindakan, dan edukasi (Inspektorat Kota Banda Aceh, 2024). Strategi ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi yang ketat, pengawasan yang kuat, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi.

Beberapa strategi inovatif yang terbukti efektif dalam berbagai kasus pemberantasan korupsi meliputi:

- a. Implementasi sistem *e-procurement* dan open data untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan proyek (Indonesia Global Compact Network, 2024).
- b. Audit berkala serta keterlibatan lembaga independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam *monitoring* proyek-proyek publik (Akbar, 2024).
- c. Kampanye anti-korupsi dan pelatihan integritas bagi pejabat publik guna menanamkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas (Gultom et al., 2024).
- d. Memberikan penghargaan kepada pejabat yang berintegritas dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera (CNN Indonesia, 2024).

- e. Kerja sama antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun sektor swasta, dalam pengawasan dan pengelolaan proyek transportasi publik (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024).

2.3 Implementasi Strategi Inovatif dalam Pemberantasan Korupsi

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pemberantasan korupsi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut penelitian Gultom et al. (2024), sistem *e-government* dan *whistleblowing system* telah terbukti mengurangi praktik korupsi dalam proyek-proyek transportasi publik di beberapa negara. Digitalisasi pengadaan proyek memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara *real-time*, sehingga mengurangi peluang bagi oknum untuk melakukan praktik korupsi.

Selain itu, studi dari Akbar (2024) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dilibatkan dalam pengawasan, risiko terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dari berbagai studi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi dalam proyek transportasi publik, seperti kasus Railink di Bandara Kualanamu, membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Strategi inovatif berbasis teknologi, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi penyebab korupsi dalam kasus Stasiun Railink di Bandara Kualanamu serta merumuskan strategi inovatif dalam pemberantasan korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur, laporan resmi pemerintah, pemberitaan media, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus korupsi di sektor transportasi publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri dokumen-dokumen terkait praktik korupsi di proyek Railink serta kebijakan pemberantasan korupsi yang telah diterapkan di sektor publik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis komparatif dengan membandingkan kasus korupsi Railink dengan beberapa kasus korupsi lain di sektor transportasi. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat pola umum dalam praktik korupsi di sektor tersebut serta mengevaluasi efektivitas strategi pemberantasan yang telah diterapkan di berbagai negara.

Hasil dari penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu penyebab korupsi di Stasiun Railink, strategi inovatif dalam pemberantasan korupsi, serta langkah-langkah implementasi strategi tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah serta menangani kasus korupsi, khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyebab Korupsi Stasiun Railink

Dalam kasus ini memiliki banyak penyebab bisa terjadinya korupsi pada kasus stasiun Railink ini, tetapi ini beberapa faktor yang bisa terjadinya kasus korupsi tersebut, berikut diantaranya :

- a. Kurangnya Transparansi: Proses pengadaan yang tertutup memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang.
- b. Birokrasi yang Rumit: Prosedur yang rumit dalam pengadaan barang dan jasa sering kali memicu praktik korupsi.
- c. Rendahnya Supervisi: Kurangnya pengawasan dan audit dalam penggunaan anggaran publik menambah risiko terjadinya korupsi.
- d. Budaya Korupsi: Lingkungan sosial yang toleran terhadap praktik korupsi menciptakan iklim yang memungkinkan tindak pidana tersebut berkembang.

Dengan disampaikan beberapa dari faktor penyebab bisa terjadinya kasus korupsi Stasiun Railink di Bandara Kualanamu ini, bisa mengembangkan suatu strategi yang lebih terarah dan efektif untuk memberantas korupsi yang seperti kasus ini.

4.2 Strategi Efektif dalam Pemberantasan Korupsi

- a. Penerapan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Salah satu langkah paling signifikan dalam pemberantasan korupsi adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat informasi lebih transparan. Ini mencakup:

1. Sistem *e-Procurement*: Memperkenalkan sistem pengadaan elektronik yang dapat memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka dan dapat diaudit. Dalam konteks Railink, sistem ini harus memungkinkan publik untuk memantau tahapan pengadaan secara *real-time*.
2. Aplikasi Pelaporan Anonim: Membangun aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi secara anonim. Melalui platform ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan tanpa takut akan pembalasan.

- b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan tentang bahaya korupsi merupakan strategi yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ini bisa dilakukan melalui:

1. Kampanye Anti-Korupsi: Mengadakan kampanye di berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi, termasuk penyebaran informasi tentang kasus Railink.
2. Pelatihan untuk Pejabat Publik: Mengadakan pelatihan bagi pejabat publik dan pengawas tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

- c. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan yang kuat dan berjenjang dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi secara lebih efektif. Langkah yang perlu diambil termasuk penerapan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Salah satu langkah paling signifikan dalam pemberantasan korupsi adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat informasi lebih transparan. Ini mencakup:

1. Audit Internal Berkala: Menerapkan audit internal yang rutin dan menyeluruh untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan proyek yang dijalankan.

2. Keterlibatan LSM dan Media: Mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media untuk ikut serta dalam pengawasan proyek-proyek publik, termasuk Railink, agar transparansi tetap terjaga.

d. Kebijakan *Reward and Punishment*

Implementasi sistem penghargaan dan sanksi yang tegas dapat memotivasi pejabat publik dan pelaku usaha untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk:

1. Penghargaan untuk Pejabat Berintegritas: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pejabat yang menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.
2. Sanksi Tegas bagi Pelanggar: Menerapkan sanksi yang berat bagi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk penegakan hukum yang cepat dan adil.

e. Kolaborasi Multi-Instansi

Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi: Membentuk tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan dan penanganan kasus korupsi secara terpadu.
2. Perjanjian Kerja sama dengan Sektor Swasta: Mengajak perusahaan swasta untuk berkomitmen dalam praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, serta melakukan pengawasan bersama dalam proyek-proyek publik.

4.3 Rencana Aksi Implementasi

Untuk mengimplementasikan strategi-strategi di atas, dibutuhkan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja

Menyiapkan rencana kerja yang jelas dengan tahapan implementasi, termasuk penjadwalan, penugasan, dan target yang ingin dicapai

b. Pemantauan dan Evaluasi

Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. *Feedback* dari masyarakat dan *stakeholders* juga penting dalam proses ini.

c. Pembenahan Sistem Regulasi

Melakukan penyesuaian atas regulasi yang ada, sehingga dapat mendukung penerapan strategi inovatif dalam pemberantasan korupsi

5. KESIMPULAN

Kasus korupsi Stasiun Railink di Bandara Kuala Namu menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Dengan menerapkan strategi inovatif berbasis teknologi, pendidikan, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi multi-instansi, kita dapat bergerak menuju pemulihan kepercayaan publik serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Upaya ini bukan hanya untuk menyelesaikan kasus tertentu tetapi juga sebagai fondasi untuk sistem yang lebih baik dalam mengatasi korupsi di masa depan. Hanya dengan langkah-langkah yang berani dan inovatif, kita dapat berharap untuk membangun lingkungan yang bersih dari praktik korupsi di seluruh sektor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. (2024). *Pemberantasan korupsi di era disrupsi teknologi*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4200708/pemberantasan-korupsi-di-era->
- CNN Indonesia. (2024). *4 Tersangka Kasus Korupsi Stasiun Railink Bandara Kualanamu Ditahan*. Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241004110824-12-1151442/4-tersangka-kasus-korupsi-stasiun-railink-bandara-kualanamu-ditahan>
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–42.
- Indonesia Global Compact Network. (2024). *Anti Corruption - UN Global Compact Network Indonesia (IGCN)*. <https://indonesiagcn.org/anti-corruption-article/>
- Inspektorat Kota Banda Aceh. (2024). *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Indonesia Bebas Korupsi*. <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2024/05/15/trisula-strategi-pemberantasan-%0D%0Akorupsi-kpk-untuk-indonesia-bebas-korupsi/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Jaksa Tahan Empat Tersangka Korupsi Proyek Railink Station Bandara Kualanamu Rp5,7 Miliar*. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/jaksa-tahan-empat-tersangka-korupsi-proyek-railink-station-bandara-kualanamu-rp57-miliar-210411-mvk.html>